

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN PUBLIKASI ILMIAH

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Cahyadi, Dedy, Tinjauan Kritis Atas CA (Certificate/Certification Authority) dalam UU ITE: Perspektif Akademis, *Jurnal Informatika Universitas Mulawarman* Vol. 4 No. 1 Februari 2009.
- Choi, Inbom, Long and Winding Road To The Government Procurement Agreement: Korea's Accession Experience, Seminar paper on East Asia Options for WTO 2000 Negotiations, held in Malaysia, July 19 – 20, 1999.
- Djafar Saidi, Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2008.
- , *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Koran Kompas, KPK: Kerugian Korupsi Barang/Jasa di Pemerintahan Capai Rp 688 Miliar, Rabu 2 Desember 2009.
- Koran Kompas, Potensi Korupsi 2010 Rp 114,45 Triliun, Rabu 2 Desember 2009.
- Koran Harian Pikiran Rakyat, Hemat Dwi Nuryanto, Pentingnya Audit Dan Standardisasi "E-Procurement", Kamis 5 Maret 2009.
- MacManus, S.A. *Designing and Managing the Procurement Process* in J.L. 1996.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)*, Depok: Ringkasan Desertasi FHUI, 2009
- Mansor, Norma, *Public Procurement Innovation in Malaysia: E-Procurement*. Faculty of Economic and Administration University of Malaya, Kuala Lumpur. 2006.
- Mubaryanto, dan Suratmo M. Suparmoko, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BP FE UGM, 1987.
- Osborne .D and Gaebler .T. *Reinventing Government*, PLUME (Penguin Group Publishing), United States of America, 1993.
- Perry (ed.), *Handbook of Public Administration*, Second Edition, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Simamora , Y. Sogar, *Hukum Perjanjian-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

- Soeria Atmadja, Arifin P, State Owned Legal Entity dalam buku Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum—Praktik dan Kritik, Depok: Fakultas Hukum UI, 2005.
- Surachmin, Seminar Nasional tentang Tuntutan Ganti Kerugian dan Tuntutan Perbendaharaan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta tanggal Agustus 2007.
- Surakhmad, Winarno. Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik., Bandung: Tarsito,1994.
- The World Bank, Procurement Policy & Services Group, Washington, D.C. Oktober 2003
- Tuanakotta, Theodorus M., Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- , Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. BPK, Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI, 1983.
- , Sistem Administrasi Keuangan Negara II, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2006.
- , Modul Auditing, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2005.
- , Model Keamanan Teknologi Informasi, Architecture for the State of Arizona yang disusun oleh John McDowell, Chief Technology Planner,; The Arizona Department of Administration USA, 2001.
- , Laporan seminar tentang “Promoting Government e-Procurement: Initiatives in Europe and Japan” yang diselenggarakan oleh EU-Japan Centre for Industrial Cooperation di Tokyo, Jumat tanggal 5 Februari Tahun 2010.
- SNI SIS/IEC 27001:2009 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, BSN, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen Kitab Undang-Undang Hukum. Perdata, Burgelijk Wetboek, Diindonesiakan oleh: Prof R Subekti SH dan R Tjitrosudibio, dicetak oleh PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2002
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
- Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 23/Per/M.Kominfo/06/2008 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan Sistem E-Pengadaan Pemerintah Di Lingkungan Departemen Komunikasi Dan Informatika 20 Juni 2008

Peraturan Presiden No 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. WEBSITE

<http://adbprocurementforum.net/?p=543>

<http://cais.aisnet.org/articles/default.asp?vol=9&art=6>, Alter, S. "The Work System Method for Understanding Information Systems and Information Systems Research," Communications of the Association for Information Systems 9(9), Sept., 2002.

<http://depoarsipsetdaprovkaltim1.blogspot.com/2010/03/sistem-kearsipan-di-indonesia.html>

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_en.htm#intro, Publikasi Europe Commission The EU Single Market

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik di download pada tanggal 6 April 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik *didownload* pada tanggal 20 April 2010.

<http://lpse.blogdetik.com/2009/12/11/efek-berantai-implementasi-lpse>, Andik Yulianto, Efek Berantai Implementasi LPSE, diunduh pada tanggal 22 Maret 2009.

<http://www.blog.unila.ac.id> *didownload* pada hari tanggal 21 April 2010.

<http://www.depkominfo.go.id/produk/certification-authority/> *didownload* pada tanggal 21 April 2010.

<http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/20070822156/Kekayaan-Negara/Pemahaman-Keuangan-Negara/Page-2.html>, Soepomo, diunduh pada tanggal 30 Juni 2009

<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=183818&actmenu=39>, "E-Proc Jangan Membuat Pengusaha "Ndheprok"*didownload* pada 4 Februari 2009.

<http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499>, 2010.

<http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499>, 2010.

<http://www.peppol.eu> pada hari Kamis, tanggal 25 Meret 2010.

<http://www.uamont.edu/FacultyWeb/Hammett/ppt/AIS/ch01.ppt>. *didownload* pada tanggal 23 Maret 2009

<http://www.uncitral.org>, dokumen A/CN.9/WG.I/WP.71, Possible revisions to the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan sistem e-procurement.
- Peraturan Presiden No.106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Keputusan Presiden No.17 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1974/1975.
- Keputusan Presiden No.7 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1975/1976.
- Keputusan Presiden No.14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1976/1977.
- Keputusan Presiden No.12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan APBN.
- Keputusan Presiden No.14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan APBN.
- Keputusan Presiden No.14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN.
- Keputusan Presiden No.18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden No.14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN.
- Keputusan Presiden No.29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN.
- Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN.
- Keputusan Presiden No.24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN.
- Keputusan Presiden No.6 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan APBN
- Keputusan Presiden No.17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN
- Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden No 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Services — a revised text of the Model Law yang dipublikasikan oleh UNCITRAL, 2010.

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model.html didownload pada tanggal 27 Mei 2010.

<http://www.unescap.org>, Publikasi United Nation Economic and Social Commission for Asia and The Pasific, 2010.

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm, 27 Mei 2010.

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm, 2010.

www.surabaya-eproc.or.id, 2010.

www.ugap.fr diunduh pada tanggal 25 Maret 2010.

D. ELECTRONIC BOOK

Indrajit, Richardus Eko, Richardus Djokopranoto, Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Potensi Pengembangan E-Procurement, E-book di download pada situs www.portal.pengadaannasional-bappenas.go.id, tanggal 21 April 2010.

Patrick F.J Macrory, Arthur E. Appleton, dan Michael G. Plummer, The World Trade Organization: Legal, Economic And political Analysis-Volume I, E-book by Springer. Chapter 23: The Agreement on Government Procurement, 2010.

E. LAINNYA

Draft Revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipublikasikan oleh LKPP pada website www.lkpp.go.id, 2010.

RPP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Draft April 2010.